

Pendekatan Sejarah Dalam Berpikir Hukum

oleh Agung Wibowo

Abstrak

Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan tidak luput dari perkembangan. Hal ini sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam cabang ilmu pengetahuan lainnya, terutama ilmu sosial. Perkembangan dalam ilmu hukum meliputi banyak hal seperti tema, penulisan, metode, hingga metodologi. Salah satu perkembangan dari ilmu hukum yang cukup banyak menarik minat para pemikir filsafat hukum adalah perkembangan metodologi sejarah. Telah banyak perdebatan yang dilakukan para pakar hukum menyangkut metodologi sejarah. Dalam makalah ini akan disajikan mengenai perkembangan metodologi hukum-sejarah, kita dapat menjumpai tiga aliran besar metodologi hukum-sejarah, yaitu narativisme, strukturalisme, dan strukturisme. Pendekatan sejarah-hukum dapat difungsikan melalui metode sejarah melalui beberapa pendekatan obyek penelitian hukum. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengembalikan peran manusia atau aktor (human agency) dalam perubahan hukum yang akan menentukan alur hidup manusia ke depan. Dua gaya penulisan sejarah akan menjadi gambaran tentang betapa menariknya peran manusia sebagai kajian sejarah-hukum.

Kata Kunci: *Sejarah, Hukum, Historiografi.*

Ilmu pengetahuan sejatinya berkembang, sejalan dengan apa yang dialami manusia di dalam kehidupan. Mereka terus belajar dan belajar atas semua yang terjadi. Sejarah sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan juga tidak dapat lepas dari perkembangan. Perkembangan dalam ilmu sejarah meliputi banyak hal seperti kajian, penulisa, metode, hingga metodologi¹ Setiap perjalanan panjang perubahan itulah yang telah mengantar para sejarawan untuk melakukan berbagai macam kajian.

Salah satu perkembangan dari ilmu sejarah yang menjadi perhatian bagi banyak sejarawan adalah perkembangan metodologi sejarah. Telah banyak diskursus yang dilakukan para sejarawan menyangkut metodologi sejarah. Para sejarawan terus melakukan perdebatan tentang metodologi bukan tanpa alasan. Perdebatan itu pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yaitu menjadikan ilmu sejarah semakin mendekati kebenaran sebagaimana adanya. Akar perdebatan

¹ Dalam ilmu sejarah, mesti dibedakan secara tegas antara 'metode' dengan 'metodologi'. Metode menekankan pada kegiatan penelitian sejarah, sedangkan metodologi terkait dengan kegiatan penulisan sejarah dan penekanannya terhadap eksplanasi.

mendekatkan kajian sejarah-hukum itu sendiri dapat dilacak melalui metodologinya, maka perlu dilihat atas sejarah perkembangan metodologi sejarah.

Dalam perkembangan sejarah metodologi sejarah, kita dapat menjumpai tiga aliran besar metodologi sejarah, yaitu *narativistik*, *strukturalistik*, dan *strukturistik*. Narativistik atau pemaparan secara naratif dikembangkan oleh F. R. Ankersmit yang mengikuti pendapat Johan Gustav Droysen, bahwa kisah memiliki kemampuan merangkai peristiwa-peristiwa dalam suatu bentuk utuh (holistik).² Narativisme merupakan bentuk awal dari sejarah kritis yang dirintis pada akhir abad ke-19. Salah satu motor narativisme yang paling terkenal adalah Leopold Von Ranke. Ranke menganjurkan supaya sejarawan menulis apa yang sebenarnya terjadi, *wie est eigentlich gewesen*.³ Oleh karena itu, narativistik menekankan fokusnya pada peristiwa, terutama peristiwa politik.

Disini sejarah diharapkan ditulis dengan urutan kronologis melalui pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Sejarawan hanya diharapkan untuk memasang fakta, baik fakta keras maupun fakta lunak, untuk mengungkap peristiwa yang terjadi di masa lalu tanpa harus memberikan analisis rinci dari setiap fakta tersebut. Narativistik juga menempatkan tokoh sebagai faktor determinan dalam peristiwa sejarah sehingga kebanyakan karya narativistik didominasi oleh cerita para tokoh atau orang-orang besar. Dengan demikian, narativistik hanya memunculkan sejarah sebagai sebuah cerita dari orang-orang besar di masa lalu. Maka, tidak heran jika ada yang mengatakan sejarah yang ditulis dengan metodologi narativistik hanya merupakan *l'histoire historissant*, suatu cerita yang menggairahkan.⁴

Karena sifat-sifatnya yang demikian, narativisme tidak memuaskan para sejarawan dalam mengungkap masa lalu. Karena itulah muncul kritikan terhadap pendekatan narativisme. Seorang pengkritik narativisme, sejarawan Amerika Harvey Robinson, mengatakan bahwa dengan cara yang dipakainya itu

² F.R. Ankersmit, *Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* (Gramedia, Jakarta: 1987).

³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bentang, Yogyakarta: 2005), hlm. 58.

⁴ Sartono Kartodirjo, *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah* (UGM Press, Yogyakarta: 1987), hlm. 187.

narativistik hanya mengungkap permukaan, tetapi tidak mengungkap yang di bawah realitas, dan tidak dapat memahami perilaku manusia.⁵ Sementara sejarawan Amerika lainnya, Carl L. Becker, memandang bahwa sejarah obyektif seperti yang disarankan Ranke, tidak mungkin dapat ditulis oleh karena adanya psikologi yang mempengaruhi si penulis. Kritikan juga datang dari beberapa sejarawan Perancis yang tergabung dalam mazhab *Annales*. Kelompok ini mengkritik tajam para sejarawan tradisional yang selalu menempatkan peristiwa dan tokoh sebagai fokus utamanya. Lewat jurnalnya, *Annales d'histoire économique et sociale*, mereka mengajukan sebuah pendekatan baru yang tidak lagi menjadikan peristiwa dan tokoh sebagai fokus utama dalam penulisan sejarah. Mereka menginginkan sejarah yang lebih manusiawi dan lebih luas dari sekadar sejarah tokoh dan politik. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan *strukturalistik*.

Para pengikut strukturalisme sejarah tidak terlalu menganggap penting tokoh—meski tidak menegasikannya. Bagi mereka, struktur yang berperan dalam perubahan. Struktur dianggap berperan dalam menentukan tindakan seseorang. Tokoh bukanlah satu-satunya faktor determinan dalam perubahan. Maka tidak heran jika dalam karya strukturalis, kita akan jarang sekali menemukan nama-nama tokoh. Pendekatan ini juga menekankan bahwa perubahan terjadi karena masuknya unsur asing dalam struktur. Strukturalistik juga lebih menekankan analisis daripada deskripsi. Oleh karena itu, kronologis sebuah peristiwa tidak terlalu mendapat perhatian penting dalam pendekatan ini.

Perubahan dalam struktur menjadi fokus kajian dalam pendekatan ini. Perubahan dalam struktur itu yang coba dianalisa. Struktur mengandung kompleksitas seperti agama, ekonomi, budaya, ideologi, dan sebagainya, maka untuk menulis sejarah dengan pendekatan ini memerlukan bantuan ilmu lain, terutama sosiologi, antropologi, dan ekonomi sebagai alat bantu analisis. Pengaruh pendekatan ini kemudian sampai di Indonesia. Adalah Sartono Kartodirjo yang mengembangkan pendekatan ini di Indonesia. Sartono memandang pendekatan ini dapat mengungkap berbagai sisi dalam sejarah Indonesia yang tidak terungkap seperti identitas nasional. Ia mengajukan

⁵ Kuntowjyo, *ibid*, hlm. 58.

penulisan sejarah dengan pendekatan multidimensional, yaitu mengawinkan cara kerja ilmu sosial dengan metodologi sejarah.

Seperti halnya narativistik, strukturalistik pun tidak dapat lepas dari kritik. Strukturalistik mendapat guncangan dari sebuah pendekatan baru yang muncul pada dekade 1980-an. Pendekatan baru ini sendiri muncul sebagai reaksi atas post-modernisme yang menyerang ilmu sejarah. Strukturistik mencoba mengatasi kritikan post-modernisme terhadap ilmu sejarah yang menyangkut kemampuan ilmu sejarah dalam memperoleh dan mengungkapkan kebenaran dan masa lalu. Pendekatan baru ini juga mencoba mengatasi dikotomi antara peristiwa dan struktur sosial sebagai obyek penelitian sejarah. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengembalikan peran manusia atau aktor (*human agency*) dalam perubahan. Sebab, dalam pendekatan ini manusia lebih dipengaruhi pikiran atau ego daripada struktur yang mengelilinginya. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan *strukturistik*.

Berpikir Hukum dalam Historiografi Indonesia

Historiografi (penulisan sejarah) Indonesia, setidaknya dalam beberapa dasawarsa terakhir ditandai beberapa perkembangan penting, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, kita menyaksikan kemunculan semakin banyak karya sejarah, baik yang ditulis sejarawan Indonesia maupun sejarawan asing (Abdullah, 1996).

Dalam perspektif kecenderungan dan perkembangan baru dalam historiografi Indonesia adalah penerbitan beberapa karya besar sejarah yang dapat dijadikan alas sebagai historiografi yang memiliki kecenderungan untuk masuk dalam kajian hukum yang tentunya akan berperan sebagai kajian di masa-masa mendatang. Salah satu historiografi yang terbit paling akhir adalah penerbitan edisi Bahasa Indonesia karya Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, 3 Jilid (*Le Carrefour Javanais: Essai d'histoire globale*, 1990). Karya ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu di antara sedikit karya-karya yang amat menarik dan penting di Indonesia. Nusa Jawa telah turut mewakili dan memperkuat momentum bagi kemunculan corak historiografi yang relatif baru

bagi kajian-kajian sejarah di Indonesia. Masyarakat Jawa merupakan fakta tersendiri dalam riset di buku ini.

Karya penting lain yang agaknya perlu disebut tak hanya dalam pendekatan mengungkapkan fakta dan realita yang selama ini ditutupi tapi juga merupakan sejarah pemberontakan dan pergolakan masyarakat. Karya tersebut merupakan maha karya Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*. Karya ini diterbitkan dalam dua jilid; jilid pertama *The Lands below the Winds* (1988); dan jilid kedua, *Expansion and Crisis* (1993).

Dari segi cakupan pembahasan, sejarah sosial, seperti karya Reid atau Lombard jelas sangat luas dan kaya. Mereka menulis sejarah global atau lebih populer lagi disebut sejarah total (*total history*) yang sering juga disebut sebagai “*New History*” (Marwick, 1985: 64), dalam pendekatan ini tidak banyak sejarawan yang menggunakan sejarah total. Kebanyakan tetap menggunakan pendekatan sejarah konvensional yang pada dasarnya bertitik tolak dari sejarah politik. Tetapi sejarah total adalah sejarah tentang seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya berkisar pada bidang-bidang yang dianggap paling penting, seperti politik khususnya. Di sini sejarah total identik pula dengan sejarah sosial, semua aspek kehidupan masyarakat dalam perkembangan historisnya, sejak dari geografi, pelapisan sosial, demografi, estetika, ekonomi dan perdagangan, birokrasi, hukum, peranan wanita dan seterusnya.

Peluang pendekatan kajian sejarah-hukum dapat juga terejewantah melalui sejarah total (atau sejarah sosial) dalam hal ini berbagai tokoh klasik selain Lombard, semacam Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand Braudel, dan Emmanuel Le Roy Ladurie telah melakukan kajian sejarah aliran baru tersebut (*new history*). Dalam pemahaman sejarah total, sebagaimana dikemukakan Bloch, sejarah merupakan sebuah “ilmu” yang bertujuan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi structural yang tersembunyi dan dalam, menyibakkan mekanisme historis yang terdapat dalam struktur hukum, ekonomi, geografis dan kultural (Bloch, 1954: 13-14).

Ada beberapa hal yang menjadi penting mendalami kajian sejarah hukum. Antara lain memperlihatkan adanya perubahan dan perkembangan ilmu hukum yang terjadi bukan hanya disebabkan adanya perbedaan kondisi suatu daerah atau negara melainkan juga dari waktu-waktu ke waktu hukum di suatu tempat mengalami perubahan dan perkembangan.

Sejarah hukum dapat membantu kita untuk mengerti norma atau ketentuan hukum yang berlaku pada masa sekarang, memberikan gambaran kontekstualitas dengan keadaan sekitar. Sejarah hukum dapat memberikan pemahaman mengenai budaya dan pranata hukum sehingga sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pegangan bagi para yuris dalam penegakan hukum.⁶ Dapat pula meletakkan hukum sesuai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu serta juga diakui sebagai suatu gejala historis (meletakkan hukum sesuai dengan perkembangan sejarahnya).

Sejarah merupakan kajian informasi mengenai seluruh aspek dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (*multidimensional approach*) yang tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Ini berarti sejarah mengkaji masyarakat dalam sebuah totalitas sedangkan sejarah hukum dari aspek tertentu saja yakni aspek hukumnya.

Kajian sejarah hukum dapat berperan di dalam pandangan idealisme hukum⁷ dianggap sebagai perwujudan atas sebuah gagasan absolut yang pada hakikatnya cenderung apriori dan ahistoris. Meskipun gagasan tersebut dapat diuraikan secara tertib namun sangat sulit untuk melihat keterkaitan antara gagasan yang satu dengan yang lain. Pendekatan sejarah menjadi penting.

Dalam pandangan materialisme hukum dianggap sebagai produk atau realitas masyarakat. Hukum bukan merupakan perwujudan ide, layaknya keadilan

⁶ Menurut Brian Z. Tamanaha, kajian tentang hukum dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif (Tamanaha, 2006: 91-101).

⁷ John Gillisen dan Frist Gorle mengemukakan adanya dua pandangan dalam menilai sisi historitas hukum, yakni oleh visi Idealitas Spiritualistis dan Visi Materialistis Sosiologis.

dan rasio. Pandangan ini sangat dekat dengan pendekatan historis dan memberikan sumbangsih yang besar bagi pembentukan hukum yang dinamis.

Belajar pada Agen Perubahan

Pendekatan sejarah-hukum akan kental apabila kajian tersebut lekat dengan kajian masyarakat (*social approach*). Saya akan beri dua contoh dari dua historiografi yang mungkin dapat menggambarkan kajian berporos pada agen perubahan (*human agency*), pertama yakni sejarah kaum elit (*history from above*), tentang tokoh elit (Tjokro) dalam perubahan masyarakat dan kedua, dari sejarah struktur masyarakat, tentang (*history from below*), berdasar tentang kisah para jawara yang berperan di dalam pergolakan tiga daerah di Tegal, Brebes dan Pekalongan.

Kisah pertama kita dapat belajar dari kemunculan elit di masa pergerakan nasional di Indonesia yang tidak terlepas dari keadaan masyarakat tradisional di zaman kolonial. Keadaan masyarakat tradisional dan struktur sosialnya pada zaman kolonial menampakkan pola yang seragam di antara pelbagai bangsa yang memperoleh kemerdekaannya sesudah Perang Dunia II. Di satu segi, perjuangan politik melawan penguasa kolonial. Di sisi lain proses modernisasi yang mengubah masyarakat tradisional ke arah modern di pelbagai bidang, baik pertanian, transportasi, komunikasi, birokrasi, serta pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pembaharuan tersebut untuk menciptakan kaum intelektual.⁸

Terjadi garis perubahan yang menjadi titik tolak pada sejarah Indonesia, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai elite modern.⁹ Adalah Van Deventer sebagai pemimpin liberal mempunyai pengaruh besar karena karangannya *Hutang Kehormatan* pada tahun 1899. Ia mengecam politik

⁸ Theodore Geiger menyatakan bahwa fungsi pokok dari kaum intelegensia adalah kritis terhadap yang berkuasa. Hal ini senada oleh Benda yang mengidentifikasi kedudukan serta peranan kaum intelegensia di dunia ketiga. Sumber rujukan lain mengenai munculnya elite dapat dibaca pula pada Sartono Kartodirjo (ed), *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1981.

⁹ 'Elite' adalah golongan sosial masyarakat yang terkemuka. 'Modern' merupakan pembaharuan dari sesuatu yang belum ada. Golongan elite modern menjalankan transformasi masyarakatnya menjadi bangsa yang modern dan maju.

keuangan Belanda, yang tidak dipisahkan dari negeri jajahan, sehingga memunculkan Politik Etis sebagai politik balas jasa Belanda di nusantara. Politik Etis mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan nusantara tidak lagi sebagai *wingewest* (daerah yang menguntungkan) menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya, dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi.

Sejarah munculnya elite modern dan pemimpin nasionalis Indonesia mengakar dari zaman gelap. Kemiskinan dan kemandegan memang citra Hindia-Belanda saat itu. Seperempat abad kemudian, saat kolonialisme bertemu perubahan besar akibat semangat *aufklarung* atau pencerahan Eropa, biang keladinya, politik kolonial abad ke-19, dikritik.

Sebelum abad ke 20, Indonesia hanya imajinasi belaka. Deretan kepulauan antara benua Asia dan Australia adalah deretan teritori yang belum membangun. Satu-satunya ikatan adalah ikatan yang dianyam oleh kekuatan kolonial Eropa. Berbagai pemberontakan terjadi di sana sini sepanjang khatulistiwa. Namun, pelbagai pemberontakan tersebut belum lah membawa semangat keindonesiaan. Sebagian karena alasan politik sektarian belaka dan kepentingan ekonomi semata.

Semangat Indonesia barulah muncul ketika para keturunan ningrat mendapat pendidikan dari bangsa barat yakni Belanda. Pada awal abad 20, beberapa putera ningrat berhasil bersekolah di Belanda, salah satunya adalah putera-putera keturunan Paku Alaman. Kemudian berangsur-angsur bertambah banyak orang Indonesia yang belajar ke Negeri Belanda.

Dan pada akhirnya terciptalah dua golongan elite pada masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Politik Etis berhasil mencetak "elite fungsional", yaitu jelmaan yang siap meniru dan mengabdikan demi menegakkan pikiran selamanya Belanda pengasuh Hindia. Namun yang penting, muncul juga "elite politik" atau figur politik modern yang ngotot melawan wacana kolonial secara tertutup atau terbuka.

Salah satunya H.O.S Tjokroaminoto yang mampu memberi perlawanan ideologis terhadap pemerintah Belanda, serta memberi sumbangan dalam pergulatan hidup jutaan manusia, yang mendambakan cahaya kebebasan, yakni sebuah cita-cita membentuk negara sendiri.¹⁰ Sebagaimana pengkaji Indonesia awal abad ke-20, frase cahaya mendominasi pikiran elite awal kebangkitan nasional.¹¹ Lagi pula pada tahun 1900-1925, para tokoh utama dan banyak pers yang tumbuh mengiringi politik modern elite baru menggambarkan pemikiran dengan kias bersifat terang, mengambil kata matahari, surya, bintang, fajar, nyala, suluh, sinar, cahaya, dan api. Semuanya tanda lebih luas kebangkitan kembali dan regenerasi.

Kiasan bersifat terang bukan saja simbol untuk menguatkan citra diri, tetapi juga dikotomi yang lebih bersifat moral, politik dan perbedaan generasi. Wajar jika publikasi elite awal kebangkitan diwarnai teriak lantang paradoks kata: muda/tua, maju/kolot dan sadar/masih bodoh. Dalam perspektif itu, para elite sampai pada kesadaran fundamental akan perubahan. Alhasil, 20 tahun awal abad ke-20 pergerakan Indonesia begitu dinamis, kaya ide diliputi sifat muda, maju, dan sadar.

Muda tak hanya usia biologis, tetapi juga pemikiran dan kejiwaan untuk merombak struktur lama dan menciptakan masyarakat baru yang bebas dari stigma kultural yang menghambat. Ini pulalah yang tecermin dalam pemimpin kharismatik HOS Tjokroaminoto. Bayangan masyarakat baru memacu elite modern bersikap maju, menemukan kembali harkat diri dalam diri Tjokroaminoto. Tak ayal, demokrasi pun dirasakan jadi bagian esensial hasrat maju. Sebab itu, HOS Tjokroaminoto mencuat berdampingan dengan Sarekat Islam. Pemimpin

¹⁰ Paul Gilbert mengemukakan tiga karakter yang memungkinkan sebuah kelompok sosial menjadi sebuah bangsa. Pertama, kelompok sosial tersebut harus bersifat tertutup, terbatas dan berteritori. Kedua, kelompok sosial tersebut harus secara tegas membatasi siapa yang termasuk anggota dan siapa yang tidak. Ketiga, kelompok sosial tersebut harus membangun relasi dalam jangka waktu panjang sehingga kelompok tersebut dapat mereproduksi diri senantiasa tanpa kehilangan identitasnya.

¹¹ Kesadaran tentang keindonesian ditandai oleh dua peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, pada awal abad 20. Pertama adalah kebangkitan nasional yang dipelopori oleh gerakan Budi Utomo. Kedua adalah sumpah pemuda yang menyatukan berbagai organisasi pemuda daerah dalam satu ikrar kebangsaan. Ujung kesadaran tersebut adalah diproklamirkannya Indonesia sebagai negara yang berdaulat lepas dari segala bentuk kolonialisme.

Islam ini patut menjadi kajian yang mendalam dalam segi pemikiran, birokratisasinya, maupun gerakannya. ”gerakan *nationalistisch-demokratisch-ekonomisch*” ala ratu adil, antipenindasan dan antikeangkuhan rasial.

Berbeda dengan kisah pertama yang berasal dari kaum elit, kisah kedua justru bertolak belakang, sejarah berasal justru dari bawah (*history from above*). Peristiwa ini berasal dari buku karangan Anton Lucas, *One Soul One Struggle* (2004), berisi mengenai perjalanan revolusi Indonesia yang terjadi di tiga daerah yaitu Tegal, Peralang, dan Brebes (karisidenan Pekalongan). Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober sampai Desember 1945. Terjadi setelah seluruh elite birokrat, pangreh praja (residen, bupati, wedana, camat), dan sebagian besar kepala desa diganti oleh aparat pemerintah yang baru. Pergantian seluruh aparat pemerintah ini berasal dari berbagai aliran yang pada waktu itu berkembang dan diakui oleh pemerintah yaitu Islam, komunis, serta sosialis. Di sinilah mulai terjadi pertentangan antara golongan kiri dan golongan Islam ataupun golongan lain yang merasa dirugikan.

Pergolakan revolusi Tiga Daerah penting sebagai revolusi lokal Indonesia. Revolusi Tiga Daerah merupakan salah satu revolusi lokal Indonesia yang mempunyai ciri dan keunikan khusus karena dianggap sebagai sebuah revolusi rakyat untuk mengubah struktur masyarakat kolonial dan feodal menjadi sebuah masyarakat dengan hidup yang lebih demokratis tanpa penindasan dan eksploitatif dari pemerintah kolonial.¹² Terjadinya revolusi ini merupakan wujud ketidakpuasan rakyat dengan kehidupan pada waktu itu yang didominasi oleh kemerosotan ekonomi dan kemelaratan sehingga membuat rakyat melakukan berbagai perlawanan terhadap elit birokrat.

Perlawanan-perlawanan di karisidenan Pekalongan sebenarnya sudah dirintis sejak lama, antara lain Sarekat Rakyat Pekalongan tahun 1918 ataupun PKI dan Sarekat Rakyat tahun 1926 namun perlawanan-perlawanan ini hanya dalam lingkup kecil dan meletusnya Peristiwa Tiga Daerah ini merupakan titik puncak dari perlawanan-perlawanan tersebut. Oleh sebab itu, dalam lebih

¹² Perlu diketahui Anton Lucas menggunakan sejarah lisan (*oral history*) dalam penulisan karyanya.

memahami Peristiwa Tiga Daerah harus terlebih dahulu mengetahui semua aspek kehidupan dari masing-masing daerah ini.¹³

Peristiwa-peristiwa ini antara lain, pada abad 19, ketika terjadi aksi protes terhadap tanam paksa di pabrik gula dan beban wajib kerja yang menjadi inti tanam paksa Belanda.¹⁴ Selanjutnya terjadi berbagai macam pemberontakan kecil di antaranya “*Brandal Mas Cilik*” di Tegal yang merupakan pemberontakan petani pada tahun 1864, pemberontakan ini dipimpin oleh dukun yang bernama Mas Cilik yang menyerang dan membunuh pegawai pabrik gula milik Belanda di Tegal. Selain itu, pada tahun 1926 berbarengan dengan meletusnya pemberontakan PKI di berbagai daerah, di Tegal juga terjadi pemberontakan petani yaitu aksi protes untuk melawan corvee dengan ideologi mereka yaitu ideologi komunis yang pada waktu itu merupakan salah satu ideologi masa terbesar di Indonesia.

Akibat pemberontakan petani dengan payung komunis ini mengalami kegagalan, maka para pemimpin yang terlibat dalam aksi masa tersebut banyak dipenjarakan dan dibuang di Boven Digul. Setelah kembali dari pembuangan inilah mereka kembali mengorganisasi masa di Tiga Daerah untuk melakukan revolusi yang bertujuan mengubah struktur pemerintahan pada tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemberontakan-pemberontakan petani merupakan embrio dari Peristiwa Tiga Daerah.

Penutup

Dari dua gambaran peristiwa sejarah tersebut, dapat dilihat mengenai dua perbedaan mazhab dalam melihat metodologi sejarah secara holistik —yang kemudian dapat dikawinkan dalam memandang pendekatan berbagai macam ilmu—peristiwa pertama menggambarkan tentang sejarah yang mengedepankan

¹³ Anton Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2004. Hlm 13.

¹⁴ Kajian lain juga menyebut terjadi kapitalisme di kalangan bumi putra yang menyebabkan pemiskinan bagi masyarakat di kalangan bawah, sehingga menimbulkan pelbagai pergolakan. Lihat Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaraan*. Yogyakarta: LKiS, 2008, hlm. 17-35.

figur dan bercerita tentang modernitas di kalangan elit, sehingga menyebabkan munculnya salah satu tokoh revolusi dan pergerakan sosial, yakni HOS Tjokroaminoto. Dalam peristiwa kedua justru anomali, namun menelurkan hal yang sama. Lingkup sejarah sosial lebih mengacu pada klasifikasi kelas masyarakat bawah, peristiwa sejarah melihat kebiasaan (*manners*), adat-istiadat (*custom*) dan kehidupan sehari-hari (*everyday life*), sejarah yang seperti ini yang cenderung tidak mengikutsertakan kajian kenegaraan, politik dan pemerintahan, namun dapat juga melihat perubahan di masyarakat, tapi para jawara lah yang menjadi motor perubahan.

Pendekatan dalam memandang sebuah perubahan yang disebabkan oleh agen perubahan (*human agency*) kita dapat memandang dua corong yang berlainan. Tentu kecenderungan cara pandang ini pul yang dapat dikaji sebagai bagian dari kajian hukum. Kecenderungan perkembangan historiografi Indonesia ke arah pendekatan sejarah dengan disiplin ilmu lain semisal hukum dan dalam berpikir tentang kajian hukum harus diakui bahwa menjadi hal yang sangat relatif pasti terjadi. Perkembangan tersebut akan mendorong pertumbuhan pengetahuan baik dalam kajian sejarah maupun hukum. Tantangan tersebut akan berimplikasi pada kajian yang lebih kompleks. Paling tidak pendekatan sejarah dalam berpikir hukum menciptakan sebuah paradigma untuk mengungkapkan pembentukan asal-muasal suatu peristiwa, mengungkap kelas-kelas sosial, atau agen perubahan dalam lapisan masyarakat. Paradigma hukum menjadi luas dan terbuka lebar. Dengan demikian dimensi hukum akan menjadi lebih komprehensif dan akurat, karena lebih bersifat multidimensional.

Masih terlalu sedikit referensi yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan mengenai sejarah-hukum. Sekali lagi karena minat terhadap kajian mengenai sejarah hukum masih relatif kecil bila dibandingkan dengan bidang ilmu hukum lainnya yang dipandang lebih berpotensi untuk menunjang karir dalam profesi hukum yang familiar di kalangan sarjana hukum, seperti pengacara dan lain sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang bidang ilmu sejarah hukum dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat berperan dalam peningkatan kualitas kajian hukum di Indonesia.***

Daftar Pustaka

- Bloch, Marc. *The Historian Craft*. Manchester: Manchester University Press. 1954.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. *Tokoh-Tokoh Pemikir Kebangsaan*. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional: Jakarta. 1983.
- Hartoko, Dick. *Refleksi Tentang Sejarah Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah* terj. F.R. Ankersmith. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Kartodirjo, Sartono (ed). *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES. 1981.
- Kartodirjo, Sartono. *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: UGM Press, 1987.
- , *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 2005.
- Leirissa, R.Z. “Diktat Mata Kuliah Metodologi Sejarah.” Naskah tidak diterbitkan, 2001.
- , “Metodologi Strukturalis dalam Ilmu Sejarah : Kumpulan Karangan.” Naskah tidak diterbitkan, 1999.
- , “Historiografi Suatu Tinjauan Kritis : Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Tetap pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1996
- Lloyd, Christopher. *Structure of History*. Blackwell : Oxford and Cambridge, 1993.
- Magnis Suseno, Frans. 1977. *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*. Jakarta: S.T.F. Driyarkara.
- Marihandono, Djoko. (Ed.). *Titik Balik Historiografi di Indonesia*. Jakarta : 2008.
- Poesponegoro, Marwati Djoenod dan Nugroho Notosusanto (ed). 2008. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (Edisi Pemutakhiran)*, Nana Nurliyana dkk (ed), Jakarta: Balai Pustaka.
- Sasongko, H.D. Haryo. *Kerukunan Beragama Daulat Politik dan Kereta Reformasi* Jakarta: Mizan. 2002.

Sejarah Perkembangan Bumiputera (1912-1982). 1982. Jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera.

Sudarmanto, Y.B. *Jejak-Jejak Pahlawan*. Jakarta: Grasindo. 1996.

Tilly, Charles. *From Mobilization to Revolution*. Filipina : Addison-Wesley, 1978.

Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaraan*. Yogyakarta: LKiS. 2008.

Zed, Mestika dan Zulfami. *Sejarah dan Teori Sosial*. Ed. ke-2. terj. Peter Burke. Jakarta: Obor, 2003

Zuhdi, Susanto. “Perspektif Tanah-Air Dalam Sejarah Indonesia” : Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FIB UI. 2006